

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini audit, sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agent (pemerintah daerah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai mekanisme checks and balances dipercaya mampu mempengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008 dan dari hasil penelitian *Transparency International Indonesia* tentang Indeks Persepsi Korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini audit, sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini perlu dikaji ulang karena belum ada penelitian empiris yang sejenis yang mendukung atau bertentangan dengan hasil penelitian ini.

Kata kunci: Akuntabilitas, Opini Audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Korupsi, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The purpose of the study is to test empirically the influence of accountability of local government financial statements (audit opinion, internal control systems, and non-compliance with provisions of laws) on the level of local government corruption in Indonesia. Agency theory assumes that there are many information asymmetries between the agents (local government) who have direct access to information by the principals (the public). The existence of information asymmetry that allows the occurrence of fraud or corruption by local government. Accountability of local government financial statements as a mechanism of checks and balances is believed to affect the level of local government corruption.

This study uses secondary data from the audit results of the Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia to the financial statements of local government in 2008 and the research results of the Transparency International Indonesia on the Corruption Perception Index of local government in Indonesia. This study uses purposive sampling and using multiple linear regression analysis. Before being conducted the regression test, it is examined by using the classical assumption tests.

These results indicate that the accountability of local government financial statements (audit opinion, the weakness of internal control systems, and non-compliance with provisions of laws) do not affect the level of local government corruption in Indonesia. These results need to be reviewed because there is no similar empirical study that support or contradict the results of this study.

Keywords: accountability, audit opinion, the weakness of internal control systems, non-compliance with provisions of laws, corruption, local government.